



PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

Rencana Kerja Perubahan | 2019

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Jenderal Sudirman No.460, Jadirejo,
Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156
Telp. (0761) 45505 , Fax. (0761) 45507



GUBERNUR RIAU
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 989/IX/2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2019

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur Riau.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana maksud diktum kesatu berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019.

KETIGA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang telah diverifikasi meliputi seluruh Perangkat Daerah Provinsi Riau.

KEEMPAT

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2019. Diharapkan nantinya Perubahan RENJA 2019 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan hukum	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penulisan	I-10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II	II-1
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Program pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2019.....	II-2
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.....	II-4
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan SKPD pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Renja Perubahan SKPD), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang

lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan APBD.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Kondisi perekonomian di Provinsi Riau sampai dengan pertengahan tahun 2019 dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan perekonomian dunia. Beberapa hal yang diduga sangat signifikan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Riau adalah :

1. Pengaruh fluktuasi perekonomian global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
2. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap US\$ Dollar;
3. Pembangunan infrastruktur yang mengalami perlambatan;
4. Kerentanan wilayah terhadap bencana, terutama bencana banjir dan kebakaran lahan.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 130/SE/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019, bahwa Perubahan Renja OPD dapat dilakukan perubahan dengan mengacu hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
3. Perbaikan/review terhadap perubahan nomenklatur maupun penyempurnaan lainnya.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 dilaksanakan berkaitan dengan percepatan pelaksanaan e-government Provinsi Riau khususnya di OPD Pemerintah Provinsi Riau sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta

peningkatan keterbukaan informasi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran, target kinerja serta perubahan kelompok sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun mengacu kepada situasi dan kondisi yang ada, seperti:

1. *Layanan Komunikasi dan Informatika adalah* pembangunan bidang komunikasi dan informatika, yang meliputi :
 - *Pembangunan infrastruktur* (penyediaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas serta layanan informasi dan komunikasi yang mendukung ekonomi masyarakat di Provinsi Riau)
 - *Pembangunan Suprastruktur* (yang difokuskan kepada Pengembangan dan Kelembagaan Kelompok Informasi Sosial agar memiliki kesiapan untuk memanfaatkan infrastruktur yang telah disediakan dan mendayagunakan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat),
 - *Pembangunan infostruktur* (Penyediaan Konten Positif yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan dan meningkatkan nasionalisme masyarakat).
2. *Handal* adalah penyelenggaraan pelayanan yang aman, nyaman, faktual, cepat, tepat, transparan, dapat dipercaya dan diandalkan serta efektif dan efisien sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.
3. *Berdaya Saing* adalah suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis.

Dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik Provinsi Riau diserasikan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau termasuk mengelola Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang menangani 3(tiga) urusan, yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika.
2. Urusan Persandian.
3. Urusan Statistik.

Tahapan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2019 terdiri dari :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja OPD.

Rancangan Perubahan Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi hasil Renja Tahun 2019 sampai Triwulan II Tahun 2019 yang disampaikan kepada Bappeda Provinsi Riau.

Penyusunan Rancangan Perubahan ini mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 130/SE/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019. Rancangan Perubahan Renja dilakukan terhadap seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak.

Rancangan Perubahan ini disampaikan Kepala OPD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

2. Perumusan Perubahan Renja OPD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019, OPD menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD yang telah diverifikasi Bappeda menjadi Dokumen Perubahan Renja OPD.

3. Penetapan Perubahan Renja OPD.

Bappeda mengajukan Dokumen Perubahan Renja OPD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.

Kepala Daerah mengesahkan Perubahan Renja OPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2019.

Kepala OPD, yang renjanya baik mengalami perubahan ataupun tidak berubah, menetapkan Peraturan Renja OPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah disahkan oleh Kepala Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019 :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 - 15) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
 - 18) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
 - 19) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian
 - 20) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
 - 21) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman;
 - 22) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 23) Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;
 - 25) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019;
 - 26) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran

- Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;
 - 28) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038;
 - 29) Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta;
 - 30) Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019;
 - 31) Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 130/SE/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Rancangan Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 adalah untuk sinkronisasi, menyelaraskan dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2019 yang disesuaikan dengan Perubahan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada triwulan ke-4 Tahun 2019 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau .
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Gambaran Umum Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
- 2.2. Indikator Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2019.
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II.

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kualitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- **Menentukan apa yang akan dievaluasi.** Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.
- **Merancang (desain) kegiatan evaluasi.** Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- **Pengumpulan data.** Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai

dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

- **Pengolahan dan analisis data.** Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- **Pelaporan hasil evaluasi.** Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau didukung 10 Program, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1. REKAPITULASI PROGRAM PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II
			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
	URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
	BELANJA LANGSUNG			
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Good Government dan Clean Government	1.291.168.700	371.786.654
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya Good Government dan Clean Government	184.950.000	28.860.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Good Government dan Clean Government	243.814.750	155.841.950

IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	168.663.600	32.531.600
V	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	535.230.000	133.724.400
VI	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Terwujudnya Good Government And Clean Government	125.000.000	76.212.300
VII	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	1.912.288.800	159.778.600
VIII	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	850.000.000	307.840.000
IX	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	4.072.436.250	1.266.566.307
X	Program Pengembangan Data/Informasi	Terwujudnya Good Government And Clean Government	846.296.100	184.672.364
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		10.229.848.200	2.717.814.175

Untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program dan kegiatan berdasarkan realisasi DPA SKPD, dilakukan evaluasi hasil renja SKPD setiap Triwulan. Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II disajikan pada Tabel 2.2. berikut :

**Tabel 2.2. Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2019 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau**

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2019)		Realisasi Kinerja Pada Tw II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		
	Non Urusan														
	NON URUSAN														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-													
001	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	160	10.000.000	40	600.000	80	1.800.000	50,00	18,00	3.030	16.950.000	56,01	33,20
001	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12	12.000.000	3	802.079	6	1.012.879	50,00	8,44	30	32.647.884	62,50	11,54
001	0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara.	14	100.000.000	4	26.877.375	8	41.547.375	57,14	41,55	36	348.669.857	76,60	27,82
001	0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga dan jenis bahan kebersihan kantor yang disediakan	12	50.097.000	3	16.022.000	6	16.022.000	50,00	31,98	30	237.687.200	50	0,15
001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	12	86.175.200	3	28.318.000	3	28.318.000	25,00	32,86	27	252.136.000	45	51,12
001	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	rentang waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	50.000.000	0	0	3	2.600.000	25,00	5,20	27	269.265.000	45	35,15
001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik	12	25.000.000	3	12.150.000	6	12.150.000	50,00	48,60	56	191.721.000	93,33	40,62
001	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	8.590	210.095.000	2.363	66.295.000	4.725	72.045.000	55,01	34,29	10.788	422.947.700	32,30	52,13
001	018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70	644.584.000	19	130.752.900	26	155.766.400	37,14	24,17	137	1.051.771.867	2.740	39,01
001	023	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/K2	2	60.000.000	0	15.000.000	0	25.000.000	0,00	41,67	4	148.000.000	40	47,34
001	110	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah barang milik daerah diskominfotik	3	43.217.500	0	11.525.000	0	15.525.000	0,00	35,92	0	15.525.000	0	35,92
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										36,3	29,33			294,61	34
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-													
002	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4	75.440.750		0	0	0	0,00	0,00	6	269.968.600	120	23,59
002	030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	144	46.450.000	74	28.860.000	74	28.860.000	51,39	62,13	365	152.840.000	70,33	22,23
002	080	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	48.500.000		0	0	0	0,00	0,00	34	231.300.000	40	6,73
002	199	Penyediaan Sarana Kearsipan	jumlah jenis sarana kearsipan	6	40.000.000		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										12,85	15,53			57,58	13,14
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2019)		Realisasi Kinerja Pada Tw II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-												
005	0001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta diklat	8	59.114.000	4	43.111.200	4	43.111.200	50,00	72,93	36	230.561.200	44,44	39,20
005	012 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang dibina fisik dan Mental	70	121.000.000	0	53.174.000	0	53.174.000	0,00	43,95	141	564.215.800	45,05	61,93
005	020 Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta upacara Harkitnas	1.000	88.260.000	1.000	59.556.750	1.000	59.556.750	100,00	67,48	5.000	312.995.750	59,19	39,96
Rata-rata Capaian Kinerja (%)									50	61,45			49,56	47,03
Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Rendah
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-												
006	0005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan	1	37.609.600	0	4.400.200	0	4.400.200	0,00	11,70	55	65.511.600	17,30	25,32
006	030 Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	jumlah dokumen	1	32.554.000	0	8.639.800	0	8.639.800	0,00	26,54	0	8.639.800	0	26,54
006	120 Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	jumlah laporan keuangan opd dan ppkd	5	98.500.000	0	12.491.600	0	19.491.600	0,00	19,79	0	19.491.600	0	19,79
Rata-rata Capaian Kinerja (%)									0	19,34			5,77	23,88
Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah
	URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	-												
17	0003 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah kelompok informasi yang dibina	30	50.000.000	0	1.025.000	0	1.025.000	0,00	2,05	65	98.066.120	15,82	14,55
17	027 Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga teknis persandian	12	122.386.000	0	21.863.800	0	32.113.800	0,00	26,24	0	32.113.800	0	26,24
17	028 Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMMI)	1	114.882.000	0	22.407.000	0	33.183.000	0,00	28,88	0	33.183.000	0	28,88
17	029 Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah	Jumlah aplikasi yang di assesment dan pengamanan informasi pada	0	295.986.000	12	47.216.000	12	67.402.600	0,00	22,77	12	67.402.600	46,15	22,77
Rata-rata Capaian Kinerja (%)									0	19,99			15,49	23,11
Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah
18	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	-												
18	0007 Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	Jumlah aktivitas kemitraan dengan lembaga komunikasi	1	80.000.000	1	76.212.300	1	76.212.300	100,00	95,27	16	368.711.400	6,78	29,69
18	016 Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal	Jumlah dialog di televisi lokal	0	50.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	15	407.474.000	18,75	37,91
Rata-rata Capaian Kinerja (%)									50	47,63			12,77	33,8
Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2019)		Realisasi Kinerja Pada Tw II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19		Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	-												
19	0001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	jumlah sarana dan prasarana perangkat jaringan pemerintah	1	485.809.800	0	20.348.600	0	20.348.600	0,00	4,19	51	1.120.057.800	118,60	25,56
19	0002	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah bandwidth dedicated dan broadband up to akses internet	350	1.109.417.000	0	30.380.000	0	50.470.000	0,00	4,55	1.000	5.817.639.955	42,55	50,68
19	010	Pengembangan dan Pengelolaan Comman Center Provinsi Riau	jumlah command center yang dikelola	1	317.062.000	0	53.200.000	0	88.960.000	0,00	28,06	0	88.960.000	0	28,06
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										0	12,27			53,72	34,77
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah
20		Program Pengembangan Aplikasi Informatika	-												
20	0001	Pengembangan e-verment Provinsi Riau	tersediannya layanan aplikasi yang generik dan non generik	4	850.000.000	0	189.480.000	0	307.840.000	0,00	36,22	47	6.351.337.000	21,86	48,99
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										0	36,22			21,86	48,99
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
21		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	-												
21	0001	Pengelolaan website riau..id	Badan publik yang menyediakan layanan kominfo	1	163.000.000	0	16.120.000	0	26.240.000	0,00	16,10	1	201.252.000	33,33	5,23
21	0006	Layanan Informasi melalui media center	Jumlah bilik media center yang dikelola/jumlah website media	2	174.951.750	0	39.830.000	0	66.950.000	0,00	38,27	2	435.893.200	25	40,95
21	0007	Newsroom pemerintah provinsi riau	Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website	2.640	217.686.000	660	55.600.000	1.320	86.200.000	50,00	39,60	9.820	610.294.000	38,62	35,12
21	0008	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau	Jumlah pameran yang dilaksanakan	1	50.000.000		0	0	0	0,00	0,00	3	191.345.000	60	25,55
21	010	Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Acara Yang didokumentasikan	150	880.530.000	45	221.515.500	81	340.117.500	54,00	38,63	281	1.061.336.958	62,44	31,35
21	011	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Pelayanan terhadap penyelesaian sengketa informasi	40	1.946.933.600	10	373.776.933	20	589.832.207	50,00	30,30	44	2.908.952.147	880	41,92
21	017	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemdes yang memahami	260	285.858.900	0	63.491.600	0	64.291.600	0,00	22,49	30	291.903.700	60	46,58
21	019	Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah TV Streaming dan Radio Streaming Pemrprov Riau yang di	2	24.000.000		0	0	0	0,00	0,00	2	262.227.900	100	1.092,62
21	028	Pembinaan PPID di Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	78	230.452.000	20	38.550.000	39	62.330.000	50,00	27,05	79	287.410.500	112,86	57,52
21	032	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang	200	410.522.000	40	30.605.000	40	30.605.000	20,00	7,46	40	30.605.000	20	7,46
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										22,4	21,99			139,23	138,43
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut ini dan memuat pergeseran antar kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2019 yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2019.

Rencana program dan kegiatan ini mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan hasil evaluasi dan Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2019 antara OPD dengan Bappeda, disetujui 10 Program dan 45 Kegiatan. Alokasi Belanja Tidak Langsung pada anggaran perubahan yang terdiri dari belanja gaji pegawai sebesar Rp.13.219.526.215,90,- dan Alokasi Belanja Langsung pada Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.10.805.718.900,- atau ada penambahan sebesar Rp.575.870.700,-.

Penambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk pembayaran kegiatan yang menunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Adapun kegiatan yang ada penambahan anggaran yaitu:

No.	Nama Kegiatan	Peruntukan	Ket.
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Layanan Informasi Masyarakat (SMS Blast)	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan	
3.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Videotron	
4.	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Pendampingan Sosial Audit	
5.	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Jasa Konsultasi Pemetaan Kebutuhan Bandwidth	
6.	Newsroom Pemerintah Provinsi Riau	Pemasangan Banner online dan Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	
7.	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Biaya Operasional Komisioner Komisi Informasi	

Adapun Rincian Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja OPD adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN
II	BELANJA LANGSUNG
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman
1.9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.10	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
1.11	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.4	Penyediaan Sarana Kearsipan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal

3.2	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
3.3	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
4.2	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
4.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD
5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
5.1	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
5.2	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah
5.3	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi
5.4	Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah Daerah
6	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa
6.1	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
6.2	Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal
7	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
7.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau
7.2	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau
7.3	Pengembangan dan Pengelolaan Comman Center Provinsi Riau
8	Program Pengembangan Aplikasi Informatika
8.1	Pengembangan e-government Provinsi Riau
9	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
9.1	Pengelolaan website riau.go.id

9.2	Layanan Informasi melalui Media Center
9.3	Newsroom Pemerintah Provinsi Riau
9.4	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau
9.5	Peliputan acara dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau
9.6	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
9.7	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
9.8	Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau
9.9	Pembinaan PPID di Provinsi Riau
9.10	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik
10	Program Pengembangan Data/Informasi
10.1	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau
10.2	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau
10.3	Forum Data Sektoral Provinsi Riau
10.4	Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau

Sedangkan Rincian Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2019
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Non Urusan	Terwujudnya Good Governance And Clean Government		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100 Persen			1,495,218,700	2,386,318,000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Riau			Jumlah Surat Yang dikirim	160 Pengiriman	10,000,000	12,700,000	Lanjutan	
01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			Riau			Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	123,000,000	12,000,000	Baru	
01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Riau			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara.	14 unit	202,950,000	362,600,000	Baru	
01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Riau			Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	50,097,000	150,000,000	Baru	
01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Riau			Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	86,175,200	300,000,000	Baru	
01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Riau			Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	50,000,000	275,000,000	Lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Riau			Rentang Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	25,000,000	139,693,000	Lanjutan	
01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman			Riau			Jumlah makan dan minum yang disediakan	8.590 Porsi	210,095,000	232,325,000	Baru	
01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Riau			Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	67 Kali	644,584,000	792,000,000	Lanjutan	
01.023	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor			Riau			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	2 orang, 12 bulan	60,000,000	60,000,000	Baru	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Non Urusan	Terwujudnya Good Governance And Clean Government		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100 Persen			251,950,000	481,400,000		
02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pekanbaru			Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	50,000,000	199,100,000	Baru	
02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor			Pekanbaru			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	144 Unit	113,450,000	193,800,000	Baru	
02.080	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pekanbaru			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	48,500,000	48,500,000	Baru	
02.199	Penyediaan Sarana Kearsipan			Riau			Jumlah jenis jenis sarana kearsipan	6 Unit	40,000,000	40,000,000	Baru	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Non Urusan	Terwujudnya Good Governance And Clean Government		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100 Persen			251,950,000	481,400,000		
02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pekanbaru			Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	50,000,000	199,100,000	Baru	
02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor			Pekanbaru			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	144 Unit	113,450,000	193,800,000	Baru	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Non Urusan	Terwujudnya Good Governance And Clean Government		Persentase meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara	100 Persen			229,670,750	650,000,000		
05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal			Luar Daerah			Jumlah ASN yang didiklatkan	4 Orang	59,114,000	350,000,000	Baru	
05.012	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur			Riau			Jumlah ASN yang dibina fisik dan mental	70 Orang	111,000,000	300,000,000	Baru	
05.020	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau			Riau			Jumlah peserta upacara Harkitnas	1.000 Orang	59,556,750	266.580.000,00	Baru	
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Non Urusan	Terwujudnya Good Governance And Clean Government		Persentase ketepatan penyampaian laporan	100 Persen			115,913,600	187,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06.005	Penyusunan Rencana Kerja SKPD			Pekanbaru			dokumen Renja	1 Dokumen	26,609,600	75,000,000	Baru	
06.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD			Pekanbaru			Dokumen Renstra	1 dokumen	26,804,000	50,000,000	Baru	
06.120	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD			Provinsi Riau			Laporan Keuangan	5 jenis Dokumen	62,500,000	62,500,000	Baru	
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan dan menerapkan nilai Budaya Melayu dan Keagamaan		Jumlah masyarakat yang memahami komunikasi dan informatika	Aparatur : 424 Orang ; Masyarakat : 3.096 Orang			607,390,300	1,650,000,000		
17.003	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat			Provinsi Riau			Jumlah kelompok informasi yang dibina	30 Kelompok	142,954,300	850,000,000	Baru	
17.027	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah			Provinsi dan Kab/Kota			Jumlah tenaga teknis persandian	12 orang	122,386,000	150,000,000	Baru	
17.028	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi			Provinsi dan Kab/Kota			Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMMI)	1 dokumen	101,448,000	250,000,000	Baru	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.029	Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah Daerah			Riau			Jumlah aplikasi yang di assesment dan pengaman informasi pada objek vital dilingkungan pemerintah daerah	6 aplikasi dan 20 titik	240,602,000	400,000,000	Baru	
18.	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan dan Menerapkan Nilai Budaya Melayu dan Keagamaan		Jumlah Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	145 Kali			123,068,000	1,450,000,000		
18.007	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi			Provinsi Riau			Jumlah pertemuan lembaga komunikasi se provinsi Riau	1 Kali	78,068,000	650,000,000	Baru	
18.016	Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal			Provinsi Riau			Jumlah dialog interaktif dan iklan layanan masyarakat pada televisi	1 kali dan 30 kali	45,000,000	800,000,000	Baru	
19.	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Pendukung Capaian Misi	Pencapaian Indikator Kepala Daerah		Jumlah jaringan infrastruktur komunikasi dan informatika yang terpasang	54 Titik Jaringan			1,978,716,800	2,429,820,200		
19.001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau			Riau			Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat jaringan	Provinsi Riau	468,647,800	1,709,871,000	Baru	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.002	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau			Riau			Jumlah Bandwidth Dedicated dan Broadband Up to Akses Internet	350 Mbps (51 titik jaringan)	1,207,417,000	2,000,000	Baru	
19.010	Pengembangan dan Pengelolaan Comman Center Provinsi Riau			Riau			Jumlah Command Center yang dikelola	1 Unit	302,652,000	717,949,200	Baru	
20.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Pendukung Capaian Misi	Pencapaian Indikator Kepala Daerah		Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi informatika	70 Persen			803,000,000	3,000,000,000		
20.001	Pengembangan e-government Provinsi Riau			Pekanbaru			Tersedia layanan aplikasi generik dan non generik	4 Aplikasi	803,000,000	3,000,000,000	Baru	
21.	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Destinasi dan Event-event Pariwisata		Jumlah badan publik yang menyediakan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	67 Unit			4,421,701,850	7,117,467,000		
21.001	Pengelolaan website riau.go.id			Riau			Jumlah Website Pemerintah Provinsi Riau Yang dikelola	1 Website	137,876,600	250,000,000	Baru	
21.006	Layanan Informasi melalui media center			Riau			Jumlah Media Center yang dikelola	2 bilik, 1 website	174,951,750	532,344,000	Lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.007	Newsroom Pemerintah Provinsi Riau			Riau			Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website	10 Berita/Hari	521,825,000	901,219,000	Baru	
21.008	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau			Riau			Jumlah pameran yang dilaksanakan	1 Kali	50,000,000	192,930,000	Lanjutan	
21.010	Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau			Provinsi Riau			Jumlah Acara Yang Diliput dan Didokumentasikan	150 acara/kegiatan	880,530,000	1,200,000,000	Baru	
21.011	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau			Provinsi Riau			Pelayanan terhadap penyelesaian sengketa informasi publik	40 kasus	1,727,453,600	2,000,000,000	Baru	
21.017	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah			Pekanbaru			Jumlah masyarakat dan aparatur pemdes yang memahami keterbukaan informasi publik	260 orang	285,858,900	550,000,000	Baru	
21.019	Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau			Provinsi Riau			Jumlah TV Streaming dan Radio dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola	2 unit	24,000,000	850,000,000	Lanjutan	
21.028	Pembinaan PPID di Provinsi Riau			12 Kab/kota Se Provinsi			Jumlah PPID dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	78 orang	208,684,000	230,452,000	Baru	
21.032	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik			12 Kab/Kota			Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memahami keterbukaan informasi publik	200 orang	410,522,000	410,522,000	Lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Pendukung Capaian Misi	Pencapaian Indikator Kepala Daerah		Persentase ketersediaan data/ informasi Persentase, ketersediaan data sektoral per kewenangan urusan	100 Persen; 100 Persen			779,088,900	2,350,000,000		
15.088	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau			Provinsi Riau			Tersedianya Data se Provinsi Riau	4 Kelompok Data	267,541,160	450,000,000	Baru	
15.089	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau			Provinsi Riau			Jumlah data yang di update dan diolah	4 Kelompok Data	286,284,040	800,000,000	Baru	
15.090	Forum Data Sektoral Provinsi Riau			Provinsi Riau			Terlaksananya Forum Data Sektoral Provinsi Riau	100%	68,277,700	500,000,000	Baru	
15.095	Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau			Provinsi Riau			Data yang terintegrasi dan berbagi pakai OPD di Pemprov Riau hingga Kab/Kota se Povinsi Riau	10 OPD Pemprov dan Kab/Kota	156,986,000	600,000,000	Baru	
	TOTAL =								10,805,718,900	21,702,505,200		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu perubahan bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pekanbaru, 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau



Ir. H. YOGI GETRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199303 1 002